



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166  
TELUKBETUNG 35215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2010

### TENTANG

### REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, DPRD Provinsi Lampung telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 pada huruf a, DPRD menetapkan Keputusan sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Rekomendasi atas Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688 );
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Th 2004 No 125, Tambahan lembaran Negara RI No 4437) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentang;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, (Lembaran Negara RI Th 2004 No 91, Tambahan Lembaran Negara RI No 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara RI Th 2007 Nomor 47,Tambahan Negara RI Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan( Lembaran Negara RI Th 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Th 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Th 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah No 41 Th 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Th 2007 No 89, Tambahan Lembaran Negara RI No 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 18 Mei 2010.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Rekomendasi DPRD Provinsi Lampung Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. ✓
- KEDUA** : Rekomendasi dimaksud Diktum KESATU berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah Provinsi Lampung dalam rangka perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 Mei 2010.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**  
Ketua,

Ir. ~~UMAR~~ MARWAN CIK ASAN, MM.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Para Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung;
3. Muspida Provinsi Lampung;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung;
5. Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Bupati/ Walikota se provinsi Lampung;
7. Ketua DPRD Kabupaten/ kota se Provinsi Lampung.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2010**  
**TANGGAL : 18 MEI 2010**  
**TENTANG : REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PROVINSI**  
**LAMPUNG TAHUN 2009.**

=====

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perilaian atas LKPJ Kepala Daerah oleh DPRD adalah salah satu cara DPRD untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan, membantu membuat kebijakan, upaya melakukan perbaikan dan memberikan dukungan (support) agar jalannya pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang, Selain menjalankan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP No 3 Tahun 2007 ttg LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD, maka evaluasi terhadap LKPJ dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi lebih kepada upaya untuk memperbaiki agar ke depan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih baik, efisien dan efektif. Jika DPRD mengetahui secara jelas kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemda dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, maka DPRD akan turut membantu memberikan dukungan, terutama secara politis agar kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Kita semua menginginkan pembangunan di Lampung berjalan secara berkesinambungan (sustainable development), yaitu ada keterkaitan antara program tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun yad. Sehingga seharusnya LKPJ juga menggambarkan hal-hal yang sudah dicapai selama ini dan apa saja ekndalanya. Dengan demikian, diharapkan LKPJ yang baik hendaknya memuat informasi / data yang sangat diperlukan.

## BAB II GAMBARAN UMUM LKPJ TAHUN 2009

Penilaian secara umum terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung TA 2009 bahwa LKPJ tsb kurang informative, sehingga kurang dapat memberikan gambaran atas kinerja yang telah dilakukan. Ada beberapa satker yang menyatakan tidak ada masalah dalam menjalankan program dan kegiatannya, padahal banyak keluhan masyarakat di satker yang mereka tangani. LKPJ TA 2009 tsb sangat kurang menyajikan data-data (kuantitatif) tentang target dan realisasi anggaran yang sudah dipergunakan, dan realisasi terhadap perkembangan kinerja yang sudah dicapai satker selama ini. Dengan demikian, untuk melakukan evaluasi dan menghasilkan penilaian yang objektif dapat dilakukan dengan :

- a. Membandingkan antara realisasi dengan target pada tahun ybs
- b. Membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya
- c. Membandingkan dengan propinsi atau wilayah lain yang hampir homogen
- d. Membandingkan dengan tingkat nasional
- e. Membandingkan dengan instutusi/bagian/satker lain

LKPJ TA 2009 lebih banyak memberikan Informasi yang bersifat deskriptif dan normative. LKPJ masih sangat kurang mencantumkan data untuk mendukung evaluasi tsb, sebab untuk melakukan evaluasi yang objektif memerlukan data yang akurat dan lengkap. LKPJ TA 2009 juga tidak banyak menguraikan masalah kendala yang dihadapi selama ini. Seolah semua berjalan dengan lancar. Seharusnya menyajikan potret diri tentang pelaksanaan pembangunan yang sesungguhnya secara komprehenship, apalagi saat ini DPRD baru dilantik ini, maka akan sulit mengevaluasi jika data yang ada terputus dengan periode-periode yang udah dikerjakan dan dicapai sebelumnya.

LKFJ seharusnya minimal memuat data tentang:

- a. Target dan realisasi anggaran yang digunakan di setiap satker. Perkembangan realisasi dari kinerja setiap capaian, termasuk data tentang apa-apa yang sudah dicapai pada 2 tahun sebelumnya(2007,2008), bahkan jika perlu periode 5 tahun sebelumnya
- b. Kendala dan solusi yang mungkin ditawarkan setiap satker.

### BAB III

## CAPAIAN VISI - MISI PROVINSI LAMPUNG

Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Visi-misi daerah merupakan referensi kepala daerah dalam mengarahkan jalannya pembangunan dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Keberhasilan mengelola pembangunan dan sumber-sumber keuangan ini, salah satunya bisa diukur dengan melihat capaian dari *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*.

Peningkatan IPM suatu Provinsi tidak terlepas dari upaya keberhasilan pembangunan sebagai dampak terjadinya laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sebaliknya skor IPM yang rendah, berkorelasi dengan tingkat kemiskinan yang makin meningkat akibat kurang efektif dalam mengelola pembangunan daerah dan sumber-sumber keuangannya. IPM akan meningkat jika Pemerintah Daerah Provinsi Lampung lebih serius memprioritaskan pembangunannya di sektor kesehatan, pendidikan, serta didukung fasilitas infrastruktur yang memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menjaga stabilitas harga.

Dari angka IPM yang diterbitkan oleh Badan Statistik Nasional 2010, terlihat bahwa IPM Provinsi Lampung 70,30 terendah se Sumatera, dan masih di bawah rata-rata nasional 71,7. Jika dibandingkan secara nasional, Prov. Lampung berada di peringkat 19, sementara Riau, Sumsel, Sumut, Sumbar jauh di atas Lampung. Pertanyaannya adalah apakah sudah optimal upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Prov Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Tabel: Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung, dan Perbandingan dengan Beberapa Wilaya/Negara, Tahun 2004-2008

Provinsi	2005	2006	2007	2008	Rangking Nas
DKI Jakarta	75,8	76,1	76,3	77,03	1
Riau	72,2	73,6	73,8	75,09	3
Sumatera Utara	71,4	72	72,5	73,29	8
Sumatera Barat	70,5	71,2	71,6	72,96	9
Bengkulu	69,8	71,1	71,3	72,14	11
Sumatera Selatan	69,6	70,2	71,1	72,05	12

Jambi	70,1	71	71,3	71,00	13
Nanggroe Aceh Darusalam	68,7	69	69,4	70,76	17
<b>Lampung</b>	<b>68,4</b>	<b>68,8</b>	<b>69,4</b>	<b>70,3</b>	<b>19</b>
Indonesia	68,7	69,6	70,7	71,7	
- Singapura				94,4	
- Malaysia				82,9	
- Filipina				75,1	

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan 3 indikator, yaitu :

√ *Indeks Kelangsungan Hidup*

√ *Indeks Pengetahuan*

√ *Indeks Daya Beli*

### Capaian dan Upaya Pemda Untuk Meningkatkan Indeks Kelangsungan Hidup

*Indeks Kelangsungan Hidup* atau peluang hidup, diukur dari rata-rata usia harapan hidup. Kelangsungan hidup yang diindikasikan dengan umur makin panjang jika kesehatan masyarakat terjamin, makanan terjamin, air bersih tersedia termasuk perumahan.

Dalam LKPJ TA 2009, telah diakui jujur oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung bahwa derajat kesehatan masyarakat Prov. Lampung masih rendah. Hal ini terlihat bahwa harapan hidup masyarakat Lampung baru mencapai 69,1 tahun sementara nasional 70,5 tahun, demikian juga jumlah kematian bayi di Lampung masih tinggi, yaitu 43 bayi per 1000 kelahiran sementara nasional 34 per 1000 kelahiran, sedangkan angka yang ideal adalah maksimal hanya 19 bayi yang meninggal per 1000 kelahiran.

Tabel : Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Derajat Kesehatan	Nilai/point	Nasional	Ideal
Umur Harapan Hidup	69,1 tahun	70,5	---
Kematian bayi per 1000 kelahiran	43/1000	34/1000	19/1000
Kasus Gizi Buruk dan Busung Lapar	Kurang 20 %	---	

Saran dan Rekomendasi :

1. Anggaran sektor kesehatan di Provinsi Lampung TA 2009 baru mencapai 3 %-6% dari APBD., padahal untuk mencapai minimal derajat kesehatan yang baik minimal 10% APBD

2. Tahun 2009 di Provinsi Lampung hanya terdapat 261 unit puskesmas untuk melayani hampir 7 juta jiwa , berarti 1 unit puskesmas harus melayani 26,820 jiwa penduduk. Jumlah ini sangat kurang.
3. Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan pemda Kab/Kota harus memperbanyak puskesmas dan upaya-upaya peningkatan status puskesmas-puskesmas di kabupaten/kota, karena rakyat miskin akan lebih banyak memanfaatkan jasa puskesmas dibandingkan jasa RS, karena mereka merasa tarif berobat di puskesmas jauh lebih murah, dan lebih dekat dengan lokasi penduduk dibandingkan tarif berobat di RS
4. Bertambahnya puskesmas, berarti jumlah petugas medis yang ditempatkan di puskesmas harus ditambah, jumlah obat serta fasilitas puskesmas lainnya harus ditingkatkan baik secara kualitas alat maupun kuantitas alat-alat kesehatan.

### **Capaian dan Upaya Pemda Untuk Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pencapaian Indeks Pengetahuan**

*Indeks Pengetahuan* diukur berdasarkan prosentase kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat partisipasi bersekolah yang dicerminkan dengan pemerataan pendidikan baik formal maupun informal. Dilihat dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat pendidikan SD dan SMP sudah baik bahkan hampir mendekati 100%, namun yang sangat memprihatinkan adalah tingkat partisipasi pendidikan tingkat SMA yaitu sebesar 58,28 % artinya dari 100 penduduk usia sekolah SMA yang aktif sekolah hanya 58 orang, sedangkan sisanya 42 orang tidak melanjutkan pendidikan.

Masalah klasik putus sekolah ini karena :

- faktor kemiskinan
- beratnya beban biaya sekolah
- banyak contoh di masyarakat menunjukkan , walaupun tamatan SMA akan tetap sulit memperoleh pekerjaan, apalagi ketiadaan kesempatan bagi lulusan SMA untuk menjadi PNS.

### **Saran dan Rekomendasi**

Sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama kedua dalam menjalankan pembangunan di Provinsi Lampung tahun-tahun yad, melalui:

- a. Alokasi anggaran sektor pendidikan minimal 20% APBD dipenuhi
- b. Pemerintah Provinsi Lampung harus mempunyai upaya kongkrit agar mengusahakan agar biaya pendidikan terutama untuk masuk SMA murah , bahkan gratis (karena tingkat partisipasi sekolah SMA sangat rendah, 58%)

- c. Pemerintah Provinsi Lampung harus memperbanyak jumlah sarana dan prasarana sekolah termasuk pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten terutama pada level pendidikan SMA
- d. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, antara lain dengan perbanyak pemberian beasiswa, bahkan sekolah gratis dalam arti yang sebenarnya, untuk masyarakat miskin
- e. Bagi penduduk yang hanya tamat SMP (60% penduduk), Pemerintah Provinsi harus lebih banyak memberikan pendidikan-pendidikan informal, kursus, pelatihan yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka dan bekal cepat mencari pekerjaan
- f. Membuat target berapa banyak SD, SMP dan SMA menjadi sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

#### **Capaian dan Upaya Pemda Untuk Meningkatkan Indeks Daya Beli Masyarakat**

*Indeks Daya Beli* diukur berdasarkan pendapatan perkapita masyarakat dalam paritas daya beli dalam dollar AS. Indeks ini akan baik jika daya beli masyarakat cukup tinggi dan mampu membeli kebutuhannya. Indeks daya beli tercermin dari terjanganya tingkat harga-harga barang di pasar (inflasi). Angka ini menggambarkan juga kondisi perekonomian sesungguhnya. Untuk mencapai pendapatan yang tinggi dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, yang didukung dengan stabilitas ekonomi makro serta semua kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung berpihak pada penanggulangan kemiskinan.

Saran dan Rekomendasi :

- a. Supaya dalam APBD Prov. Lampung dapat dialokasikan dana yang memadai untuk kegiatan menjaga stabilitas harga bahan melalui :
  - operasi pasar;
  - menjaga distribusi barang
  - menyediakan faktor-faktor produksi (bibit, pupuk, dll) dengan harga terjangkau,
  - menjaga distribusi BBM
  - memperbaiki kerusakan jalan (infrastruktur)
- b. Pemerintah Provinsi Lampung harus lebih mendorong upaya-upaya penciptaan kesempatan kerja dan berusaha yang lebih luas dan merata di seluruh daerah, agar mampu menjangkau masyarakat miskin.
- c. Revitalisasi pertanian serta usaha mikro, kecil dan menengah, karena rakyat miskin berada di pedesaan.

#### **KINERJA PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

Kinerja ekonomi dapat diukur dengan tingkat PDRB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai ekspor serta jumlah pinjaman yang disalurkan perbankan. Berdasarkan kinerja yang ada,

secara umum disimpulkan bahwa kinerja ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2009 *tidak lebih baik* dibandingkan tahun 2008 dan *tidak lebih baik* bahkan terendah di Sumatera. Hal ini terlihat pada tabel berikut yang membandingkan posisi ekonomi makro Prov. Lampung dengan 4 Provinsi besar di Sumatera, yaitu NAD, Sumut, Sumbar, Sumsel.

Berikut ini disajikan posisi kinerja ekonomi makro Lampung dibandingkan 4 Prov. di Sumatera.

Tabel : Kondisi Ekonomi Makro Prov. Lampung dan Beberapa Prov di Sumatera TA 2009

Daerah	Lampung	Sumsel	NAD	Sumut	Sumbar
PDRB (Harga Konstan) (juta)	32,694,890	55,262,115	36,038,114	99,792,273	32,912,969
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,21	5,3			
Inflasi (%)	4,18	1,85	3,5	2,9	2,05
Nilai Ekspor Non Migas (US\$)	2,239,758	1,603,301	127,994	6,287,564	1,185,691
Pinjaman Perbankan (Rp juta)	22,888,338	27,911,644	-----	67,505,352	18,281,585

- PDRB Prov. Lampung terendah dibandingkan Sumatera Selatan, Utara, Barat dan NAD.
- Pertumbuhan Ekonomi Lampung 5,21 % dan masih di bawah Sumatera Selatan
- Tingkat inflasi atau kenaikan harga di prop Lampung lebih tinggi dibandingkan Prov lain di Sumatera, bahkan Provinsi Lampung melebihi nasional 10,47%
- Nilai ekspor relatif lebih tinggi dibandingkan 4 prop di Sumatera lainnya, namun jauh dibawah prop Sumatera Utara
- Pinjaman yang disalurkan perbankan Rp 22, 888.338 (juta rupiah), melebihi Sumbar namun jauh dibawah Sumut dan Sumsel

Sedangkan kinerja ekonomi di Provinsi Lampung sendiri dapat dilihat dengan membandingkannya dengan kinerja ekonomi TA 2008 atau tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disajikan pada tabel berikut. Secara umum, kinerja perekonomian Lampung periode TA 2009 *menurun dan tidak lebih baik* dibandingkan TA 2008.

Tabel: Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2008-2009

Unsur	2008	2009	Keterangan
PDRB harga konstant	Rp 31,694 M	Rp 22,741 M	Menurun (Rp 8,953 M)
Pertumbuhan Ekonomi	5,24 %	5,21 %	Penurunan (-0,57%)
Inflasi Lampung	13,48%	Inflasi Nasional 10,47%	Lebih tinggi dr target nasional 3,10 %
PAD	Rp.686,87 M	Rp 708,00 M	Peningkatan (3,2%)
Ekspor	US \$ 484 juta		
Jumlah Investasi	0,659 US \$ juta	0,659 US \$ juta	Tetap
NTP Lampung	107,02	108,05	NTP Nasional 102

**Keterangan :**

1. Dibandingkan tahun 2008, PDRB harga konstant TA 2009 menurun sangat tajam, dari Rp 31.689 M menjadi Rp 22.741 M.
2. Akibatnya pertumbuhan ekonomi juga menurun dari 5,24 % ke 5,21 % atau menurun 0,57%
3. Ketika pertumbuhan jumlah penduduk Lampung diasumsikan 1 %, maka dengan pertumbuhan ekonomi menurun 0,57% berarti penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun (-1,57 %).
4. Tingkat inflasi sangat tinggi 13,48% , angka ini harus dijaga dibawah 10%.

**Saran dan Rekomendasi :**

1. Menjaga tingkat inflasi di Provinsi Lampung, bukan tugas Bank Indonesia (BI) Bandar Lampung semata tetapi Pemda Lampunglah yang mempunyai kewenangan utama untuk menjaga tingkat Inflasi stabil.
2. Inflasi di Lampung tinggi diduga karena faktor *demand push* (hari raya dan puasa) tetapi ini merupakan hal yang normal dan tingkat inflasi akan kembali normal ketika euforia ramadhan dan lebaran selesai. Namun inflasi karena faktor *supply push* harus diantisipasi secara serius oleh Pemda karena Pemda mampu dan mempunyai kewenangan untuk menjaga itu, misal karena distribusi barang dan faktor produksi tidak lancar akibat sarana infrastruktur yang jelek dan rusak parah → ekonomi biaya tinggi, perizinan yang sulit, lama dan berbiaya besar, distribusi tersendat , harga BBM naik dsb.
3. Jumlah investasi yang masuk dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Namun terlihat jumlah investasi tahun 2009 tidak ada perubahan dengan tahun 2008, artinya penciptaan lapangan kerja baru belum terjadi.
4. Kesejahteraan petani Lampung cukup meningkat, yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) dari 108 menjadi 109, namun NTP ini perlu terus ditingkatkan ,

**Perkembangan Sektor-Sektor Unggulan Pembentuk Kinerja Ekonomi Provinsi Lampung**  
Pembangunan ekonomi didukung oleh sektor-sektor unggulan. Sektor unggulan di Prov. Lampung masih dikuasai oleh sektor pertanian namun dengan pertumbuhan yang makin disaingi oleh sektor industri pengolahan dan manufaktur. Berikut ini perkembangan masing-masing sektor selama periode 2009.

**Sektor Pertanian**

Sektor pertanian masih mendominasi PDRB, hampir 45%, namun pertumbuhannya makin menurun. Sehingga tidak bisa terlalu diandalkan namun tetap harus diperhatikan karena hampir 60 % penduduk bekerja di sektor ini. Perlu perbaikan sistim subsidi dan pendistribusian pupuk termasuk pengawasannya perlu diperketat.

## Sektor Industri

Ketika peran sektor pertanian mulai berkurang dan digantikan sektor industri, maka perlu penguatan yang lebih baik di sektor ini. Isu yang penting adalah

- Persiapan pengelolaan KAIL Tanjung Bintang secara komprehensif, antara lain management, peruntukan lahan, sarana prasarana termasuk pasokan listrik, ketersediaan jalan, limbah, drainase, kawasan perparkiran, pergudangan di Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Tanjung Bintang, sehingga ketika mulai diberlakukan tidak menambah persoalan baru.
- Perlu dikembangkan kembali memperluas areal KAIL (Kawasan Industri Lampung).

## Sektor Infrastruktur

Secara umum program di sektor infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana, meskipun masih banyak kelemahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah antara lain:

- Keterbatasan anggaran pembangunan, yang sebenarnya bisa diatasi dengan cara meningkatkan peran pembangunan oleh swasta melalui penawaran kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) pada proyek yang komersial, meningkatkan PAD dan meningkatkan alokasi anggaran pemerintah pusat ke Provinsi Lampung
- Perlu ada sinkronisasi program antar satuan kerja. Tidak terintegrasinya kegiatan antara satuan kerja sebagai akibat dari tidak jelasnya target yang hendak dicapai sehingga masing-masing satker menerjemahkan target ke depan sesuai dengan bidangnya tanpa menyesuaikan dengan program satuan kerja lain. Karena itu, visi dan misi pembangunan hendaknya tidak saja bersifat kualitatif namun juga diutamakan secara kuantitatif sehingga mudah dalam melakukan pengukuran hasil kerja
- Musrenbang hendaknya benar-benar dijadikan ajang sinkronisasi program bukan bersifat sekedar memaparkan program. Dengan demikian akan dapat diperoleh hasil yang lebih optimal

Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu satker yang bertanggung jawab atas kinerja sektor infrastruktur ini harus memperhatikan beberapa isu penting yang saat ini menjadi pembicaraan dan sorotan masyarakat luas, yaitu :

- a. Kerusakan jalan, bangunan, gedung, jembatan, irigasi serta fasilitas publik lainnya, lebih cepat.
- b. Perlu diadakan dan ditingkatkan *Uji Kualitas dan Uji Kuantitas Proyek* oleh BPK dan Lembaga Independent seperti PT
- c. Akses masyarakat terhadap perumahan, air bersih, sanitasi dan irigasi masih rendah

- d. Komoditas jagung sebagai salah satu unggulan propinsi Lampung perlu mendapat prioritas air irigasi
- e. Proses tender yang kurang transparan.
- f. Keterbatasan anggaran ke PU harus disikapi dengan pemilihan prioritas program dan kegiatan yang paling urgent dan mendesak
- g. Pemprov harus meningkatkan upaya-upaya untuk memastikan agar dana-dana pusat makin meningkat di Provinsi Lampung.

#### **Sektor Pariwisata**

Data menunjukkan terdapat 3 jenis wisata yang ada dan tersebar di Provinsi Lampung yaitu 158 jenis wisata alam, 43 wisata budaya, 2 taman ansional dan wisata ke pulau-pulau kecil. Namun kendalanya transportasi ke arah lokasi rusak parah, seluruh elemen masyarakat Lampung, terutama penduduk sekitar belum diberdayakan untuk menerima dengan baik dan ramah wisatawan,. Namun pengembangan sektor ini masih berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan dengan skala wisata tingkat lokal, contoh Pulau Pasir, Pasir Putih, Sekolah Gajah Way Kambas, Way rarem, Air Panas , Way Lalaan dll

#### **Saran dan rekomendasi :**

- a. Pemprov mulai berani menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pada event-event berskala internasional, regional, nasional, seperti contoh Sumatera Selatan dengan Sea Games nya.
- b. Namun dengan runelakukan perbaikan infratsrukutr ke arah lokasi-lokasi wisata unggulan
- c. Pengembangan sektor pariwisata ke arah pengembangan tempat-tempat wisata dan sarana prasarana yang berskala nasional dan internasional (penyediaan sarana dan parasaran yang lengkap, nyaman )
- d. Kemudahan perizinan
- e. Sadar wisata dan perbanyak diversifikasi Wisata Kuliner
- f. Program dan kegiatan seperti festival -festival al festival Krakatau, visit Lampung Year, acara ulang tahun daerah dll perlu dipertimbangkan untuk diserahkan kepada pihak swasta agar pemda tidak lagi mengeluarkan biaya dan hasilnya maksimal , bisa dikelola lebih profesional bahkan dapat mendatangkan PAD.
- g. Pengelolaan acara “skatenan” yang dilakukan pemerintah Yogyakarta dapat menjadi contoh, dimana ketika diselenggarakan oleh pemerintah dibutuhkan biaya 500 juta dari APBD setelah diserahkan ke swasta, diperoleh PAD 300 juta dari acara tersebut.
- h. Menghidupkan kembali / revitalisasi objek wisata yang akan berefek besar bagi ekonomi daerah semacam Way Kambas, Way Rarem, dan semacamnya sehingga memberikan efek besar pada masyarakat.

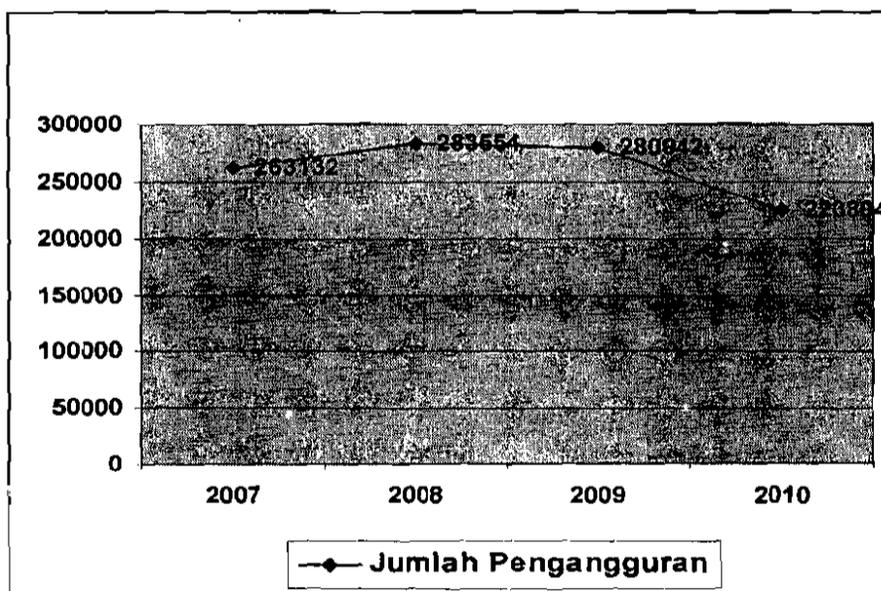
### Sektor Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Lampung yang siap dan mau bekerja ( angkatan kerja) per tahun 2009 sebanyak 3.738.337 orang, namun kesempatan kerja hanya tersedia untuk 3.457.395 orang, berarti terdapat hampir 300.000 orang yang tidak memperoleh pekerjaan (pengangguran) .Angka ini akan terus bertambah, mengingat penduduk usia kerja akan bertamab seiring dengan bertambahnya tamatan SD, SMP, SMA dan PT yang mencari pekerjaan sepanjang tahun.Jika dibandingkan dengan angkatan kerja berarti tingkat pengangguran di Lampung sebesar 8%. Tingkat pengangguran akan mulai menggerogoti pembangunan jika melebihi 4 % angkatan kerja. Oleh karena itu Pemda Propinsi Lampung harus mengantisipasinya secara serius.

Tabel : Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung TA 2008-2009

Kriteria	2008	2009	Keterangan Persentase
Penduduk Usia kerja (> 15 thn)	-----	5.345.337	72% dari jumlah pdd Lpg
Jumlah Angkatan Kerja	-----	3.738.337	Mereka yang mencari pekerjaan
Kesempatan Kerja	3.302.636	3.457.395	154.759 orang (4,7%)
Penduduk Bekerja	3.670.000	3.730.000	
Bekerja di sektor pertanian	-----	2.038.762	54,65 % penduduk bekerja di sektor pertanian
Jumlah Pengangguran	----	223.804	Tkt Pengangguran = 8%

Jumlah Pengangguran



Mengingat penduduk Lampung yang bekerja, hampir (50%) bergerak di sektor pertanian, dan sebagian lagi di sektor jasa, namun lebih banyak ke sektor informal, oleh karena itu perlu:

1. Upaya menarik sebesar-besarnya investor, termasuk investor yang berminat di luar sektor pertanian
2. Penciptaan lapangan kerja baru
3. Pemberdayaan petani melalui bantuan permodalan petani, penyerapan KUR yang rendah, in- stabilitas harga produk pertanian, mental petani yang kurang baik.
4. Masalah pertanian harus diselesaikan, antara lain distribusi dan kelangkaan pupuk, tingginya harga pupuk, ketidak tersediaan bibit unggul, saluran irigasi yang rusak, bendungan yang tidak lagi berfungsi optimal (Way Rarem, Batiu Tegi), harus diselesaikan secara komprehensif
5. Bantuan pemasaran.

### Sektor Perhubungan

Isu yang perlu diperhatikan :

- Kondisi Terminal Tipe A Rajabasa yang tidak kunjung selesai
- Keberadaan Terminal Tipe A di Terbanggi perlu ditinjau ulang karena tidak berfungsi optimal
- Perbaiki layanan AKDP
- Evaluasi terhadap kelayakan Izin Trayek yang sudah sangat jenuh terutama di bandar Lampung
- Beberapa satker belum ada dan belum menerapkan SPM
- Jika suatu kegiatan investasi akan diserahkan pembangunannya oleh swasta, maka pemda prop Lampung tidak perlu menganggarkan hingga pembuatan DED, karena kajian yang sudah menelan anggaran cukup besar tsb, akan diulang kembali oleh pihak swasta (useless)

### Sektor Energi

Agar tidak hanya menjadi penonton ketika JSS dibangun, maka pasokan energi di Provinsi Lampung harus mendapat perhatian serius oleh pemda, karena dari data yang ada, Propinsi Lampung mengalami defisit energi (listrik)

Supply listrik di propinsi Lampung hanya 348 MW, sementara permintaannya 400 MW. Berarti Lampung defisit listrik = 52 MW, atau sebesar 13 % , sehingga wajar jika masih terdapat 27,9 % desa atau 600 desa dari 2219 total desa di Lampung yang belum dialiri listrik. Padahal listrik adalah sumber kehidupan dan sarana mempercepat perkembangan perekonomian suatu wilayah.

#### Saran dan Rekomendasi :

- a. Identifikasi dan evaluasi secara akurat pasokan yang ada dan kebutuhan listrik
- b. Evaluasi perjanjian tentang pengadaan listrik selama ini dengan perusahaan
- c. Menginventarisir desa-desa sumber pertumbuhan ekonomi yang belum teraliri listrik dan memprioritaskan agar desa-desa tsb memperoleh pasokan listrik
- d. upaya-upaya yang akurat untuk penghematan listrik
- e. Mengupayakan energi terbarukan yang efisien (energi panas bumi, air, biomass, biofuel, bigass)

#### Sektor Kehutanan

Luas hutan di Provinsi Lampung 1.004.735 ha, dan kawasan hutan yang sudah rusak sebanyak 80% untuk hutan lindung. Hal ini akibat tumpang tindih antara kawasan hutan lindung dengan areal pertambangan, serta banyaknya alih fungsi hutan.

Kondisi ini akibat tidak adanya konsistensi dari pemda tentang pemanfaatan lahan (tata guna lahan) yang sudah disepakati dalam Perda RTRW.

#### Sektor Lingkungan Hidup

Isu terkait dengan lingkungan hidup baik secara lokal, nasional dan global adalah adanya global warming akibat makin habisnya hutan, pemanasan rumah kaca sehingga terkikisnya lapisan ozon dll. Oleh karena itu dalam membuat program-program pelestarian lingkungan hidup perlu diperhatikan :

- a. Optimalisasi Peran Bapedalda dengan lebih mengintensifkan penggunaan AMDAL dan evaluasi kerusakan lingkungan yang terjadi dan solusinya.
- b. Penerapan secara konsisten dan sosialisasi UU NO 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Tingginya tingkat pencemaran ( air, tanah, udara) baik yang dilakukan oleh RT, perusahaan, industri, Rumah Sakit dll, karena belum diterapkannya dan diberikan sanksi yang tegas IPAL terpadu.
- d. Kerusakan pantai (abrasi) , kerusakan hutan bakau, posisi *green belt* dilampaui untuk usaha pertambangan, penambangan liar dan tidak ramah lingkungan, beberapa hal yang harus ditindak tegas, yang selama ini sebagai salah satu penyebab nilai dan volume ekspor Lampung menurun dan menjadi sorotan dunia

#### Sektor Perumahan

Isu yang harus diperhatikan:

- Masih banyak rumah warga yang tidak permanen
- Akses rumah murah dan sehat masih rendah, terutama warga miskin

- Masih banyak kondisi pemukiman yang tidak sehat
- Swasta perlu didorong melalui regulasi dan penciptaan iklim investasi yang baik agar swasta melalui REI ikut menyediakan fasilitas pemukiman penduduk
- Memastikan alokasi untuk pembangunan rumah susun setiap tahun ada.

#### **Sektor Pertanian**

Isu-isu penting yang perlu diperhatikan :

- a. Perlu dilakukan re-inventarisasi terhadap lahan-lahan tidur termasuk tanah-tanah "tidak produktif", dimana tanah dibiarkan kosong (idle capacity) tidak diusahakan karena pemiliknya berada di luar Lampung, sementara banyak investor kesulitan mencari lahan untuk berusaha.
- b. Status tanah perlu ada kejelasan
- c. Pemrov Lampung perlu melakukan kerjasama dengan BPN dan Perbakan untuk program Pronanisasi atau sertifikasi tanah petani, yang selama ini petani tidak dapat menikmati fasilitas kredit perbankan ( un-bankable).

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Kebijakan umum pemda Provinsi Lampung dalam pengelolaan keuangan daerah adalah "meningkatkan potensi dan melindungi potensi".

Jika kebijakan umumnya demikian, maka potensi yang ada tinggal potensi tanpa upaya untuk menggalinya, bahkan potensi itu dilindungi, tidak diupayakan dicari dan dipungut atau "jemput bola". Sehingga kebijakan ini harus dicermati ulang, agar bukan hanya statement (pernyataan) tetapi menjadi rujukan utama untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan baik,

#### **Kinerja PAD**

Dibandingkan tahun 2008, usaha pajak (tax effort) yang dilakukan pemda Provinsi Lampung kurang maksimal. Hal ini terlihat dari perolehan PAD Propinsi Lampung TA 2009 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga kontribusi PAD terhadap Total APBD yang hanya 50% pada tahun 2008, juga berkurang. Jika APBD disumbang oleh PAD sebesar 50%, berarti sisanya 50% penerimaan daerah mengandalkan dari Dana Perimbangan (DAU dan DAK).

Saran dan Rekomendasi :

- a. Usaha pemungutan pajak, retribusi, sumbangan pihak ke III serta pos PAD lain-lain yang syah harus tetap harus ditingkatkan, namun dengan tetap memegang prinsip nyaman usaha dan menjaga iklim investasi tetap kondusif.
- b. Biaya pemungutan pajak (cost of collecting tax) harus efisien, jika perlu ditumpangkan pemungutannya kepada instansi lain secara tidak langsung
- c. Upah pungut 5% agar diturunkan dan disesuaikan dengan Perda, jika memang tidak ada upaya ke arah tsb kecuali kpd petugas di lapangan, bukan kepada pejabat
- d. Perhitungan dan penggunaan SILPA agar benar-benar dilakukan secara riil dan bertanggung jawab

#### **Kinerja Belanja Daerah**

Pengelolaan APBD khususnya sisi belanja daerah di Provinsi Lampung juga kurang maksimal dan masih terlihat pemborosan anggaran. Pengalokasian dana yang kurang mempunyai *efek multiplier* yang tinggi untuk perkembangan daerah terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel : Alokasi Belanja Daerah dalam APBD 2009 Prop Lampung

Unsur	Jumlah	Total Belanja	% Total Belanja
Belanja Operasional (Gaji PNS, Belanja Barang, Hibah, Bansos, bantuan keu)	Rp 1.114 trilyun	1,846 trilyun	60,34 %
Belanja Modal (peralatan, mesin, infrastruktur, irigasi, aset tetap lainnya)	Rp 233,272 M	1,846 trilyun	12,62%
Belanja Tak Terduga	Rp 91,557 M	1,846 trilyun	4,93 %
Bagi Hasil untuk Kabupaten / Kota	Rp 407,169 M	1,846 trilyun	22 %
Defisit Anggaran Terhadap PDRB	Rp 103 ,856 M	PDRB= 20.638 M	0,5 %

Terlihat bahwa hampir 65 % APBD dialokasikan untuk belanja pegawai dan untuk belanja tidak terduga. Hanya 12,62 % belanja APBD untuk pembelian modal dan 22 % untuk bagi hasil Kabupaten / Kota. Ketika belanja APBD besar dialokasikan ke belanja operasional termasuk gaji PNS, sudah sewajarnya masyarakat menuntut pelayanan yang baik yang diberikan. Jika tidak, berarti hanya pemborosan anggaran. Hal lain yang perlu lebih diluruskan penggunaannya, adalah pada *Pos Bantuan Sosial* TA 2009. Pos ini menelan dana sebesar Rp 111,878 Milyar ( 6 % dari total belanja), dan memang nilainya jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena efek multiplier yang ditimbulkan oleh pos ini terhadap pertumbuhan dan perkembangan daerah kecil, maka pada TA 2011, alokasinya harus lebih efisien, lebih efektif dan pengelolaanya harus lebih transparan dan akuntabel.

Tabel : Kondisi Belanja dalam APBD TA 2009 Yang Kurang Wajar

Unsur Belanja Operasional	Nilai	Porsi Thd Total Belanja
Belanja Pegawai	Rp 460,406 M	25 %
Belanja Barang	Rp 486,673 M	26,7%
Belanja Bantuan Sosial	Rp 111,878 M	6 %
Belanja Tidak Terduga	Rp 91,557 M	4,8 %
	<i>TOTAL</i>	62,5 %
Unsur Belanja Modal		
Belanja Infrastruktur jalan, irigasi, jaringan )	Rp 156, 242 M	8,37 %
Total Belanja	Rp 1,864 T	

Belanja yang sangat kurang rasional adalah pada pos belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga yang nilainya hampir Rp 200 M.

Sementara jika dibandingkan dengan dana untuk membangun infrastruktur yang secara jelas multi efeknya sangat tinggi memacu perekonomian daerah, hanya dialokasikan Rp 156 M., itupun terbagi untuk irigasi, jaringan serta dikurangi dengan biaya administrasi lainnya.

Pada belanja pegawai dan belanja barang hampir mendekati Rp 946 milyar atau mendekati Rp 1 Trilyun. Artinya, hampir seluruh APBD Prop Lampung dipergunakan untuk belanja yang sifatnya untuk melancarkan jalannya pemerintahan. Dengan dana sebesar itu, wajar kiranya masyarakat menuntut pelayanan publik yang lebih baik dari kinerja PNS.

Saat ini beberapa kabupaten / kota di propinsi Lampung mengalami defisit anggaran, yang jika tidak dilakukan antisipasi segera bisa mengganggu kinerja pengelolaan anggaran Provinsi Lampung. Kab/Kota tsb antara lain kasus APBD Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tulang Bawang .

#### **Saran dan Rekomendasi:**

- a. Proporsi belanja barang, belanja bantuan sosial, belanja tak terduga diprioritaskan hanya pada keperluan yang urgent.
- b. Manfaat dan penggunaannya alokasi yang kurang mempunyai efek multiplier yang tinggi untuk perekonomian daerah sebaiknya dihindari
- c. Saatnya mengelola keuangan secara lebih bijak, transparan dan akuntabel. Karena dana tersebut ada pemiliknya, yaitu masyarakat Lampung , yang sengaja mengamanahkan kepada pemda Lampung untuk mengelolanya dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Agar seluruh perubahan anggaran yang akan dilakukan kepala daerah, baik pemindahan lokasi kegiatan, perubahan jumlah anggaran, penundaan kegiatan dll harus melalui konsultasi dan persetujuan DPRD, seperti biaya tak terduga pada APBD ± 42,92 M menjadi 91,557 M tanpa pemberitahuan atau persetujuan DPRD.
- e. Pemprov Lampung melakukan langkah-langkah koordinasi untuk mengatasi dan mencari solusi guna mengatasi defisit anggaran di beberapa kab/kota di Provinsi Lampung.

## BAB V TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Isu-isu penting dalam tata kelola pemerintahan :

1. Pemprov harus membuat langkah-langkah antisipatif berlakunya UU No 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik (KIP)*, yang mulai berlaku efektif bulan Mei 2010
2. Persiapan antara lain: Pembentukan Badan Informasi Publik, SOP, Containt, Sosialisasi dll
3. Fungsi koordinasi provinsi dengan kabupaten - kota se Provinsi Lampung perlu ditingkatkan, terutama pada :
  - a. perencanaan pembangunan
  - b. pengalokasian dana bersama (tanggung rentang, misal pada kasus jalan negara dan jalan propinsi yang sudah rusak parah)
4. Mutasi pegawai sebaiknya dilakukan dengan seksama dengan mempertimbangkan:
  - a. Analisa kebutuhan yang akurat dan komprehenship al melalui pertimbangan Baperjakat.
  - b. Prinsip *The Right Man On The Right Place*;
  - c. motivasi pegawai
  - d. iklim bekerja , suasana , perasaan , dampak psikologis dan produktivitas pegawai
  - e. karir pegawai.

## BAB VI REKOMENDASI PROGRAM PRIORITAS

Berdasarkan analisa, kajian, diskusi tentang LKPJ TA. 2009 serta memperhatikan berbagai saran, dokumen tambahan, observasi, data dll, maka beberapa program prioritas sekaligus rekomendasi yang bisa diberikan agar pelaksanaan pembangunan oleh Kepala Daerah TA. 2011 dan tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik sbb :

1. Untuk Tahun-tahun selanjutnya, sebaiknya LKPJ harus dibuat se-informative mungkin termasuk target-target pencapaian visi, misi.
2. Program-program kegiatan disusun dengan mengantisipasi persoalan-persoalan yang mungkin muncul di masa depan (visoner), tidak hanya "copy paste" atau "as-usual".
3. Langkah antisipatif Provinsi Lampung mendukung dan mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), al : misal jenis informasi yang harus disampaikan ke publik, badan/institusi yang bertanggungjawab, Standard Operasional dan Prosedur (tata cara dan mekanisme) pemberitaan, waktu pemberitaan, media penyampaian, prosedur penyanggahan dll.
4. Mengingat sektor infrastruktur merupakan faktor turunan dari arah kebijakan pembangunan pemerintah maka secara umum upaya yang perlu dilakukan oleh Pemda Lampung adalah:
  - a. Memastikan dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung dapat meningkat ( untuk pembangunan jalan, perumahan rakyat/rusun, dan sebagainya ).
  - b. Meningkatkan alokasi sektor pembangunan infrastruktur dalam APBD Lampung sehingga mencapai angka 20% dari total APBD, dengan pengalihan sebagian pos anggaran dari hibah, Bansos, belanja barang dan belanja tak terduga.
  - c. Menciptakan paket investasi infrastruktur sehingga swasta dapat mudah memilih investasi apa saja yang bisa mereka lakukan di Lampung dan memasarkannya melalui kegiatan "Lampung Infrastructure Summit", misalnya untuk penawaran pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta api, energi panas bumi, rumah susun, air bersih, pengolahan sampah, pariwisata, dan sebagainya.
  - d. Memperbaiki jalan yang mengalami kerusakan terutama di daerah pusat kegiatan ekonomi dengan lebih mengutamakan kuantitas / panjang jalan dan diupayakan agar setiap rupiah pembangunan infrastruktur Lampung yang dilakukan oleh pemda dapat memberikan efek pada peningkatan ekonomi daerah, peningkatan PAD, dan peningkatan investasi swasta, selain sekedar memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- e. Menjamin pasokan energi listrik dengan meningkatkan investasi perusahaan energi baik swasta maupun BUMN dan mengutamakan energi terbarukan (gas dan panas bumi).
5. Dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata, maka Pemda Lampung perlu melakukan :
    - a. Persiapan pengembangan sektor pariwisata unggulan, baik paket nasional maupun internasional, terutama dalam rangka mengantisipasi terwujudnya JSS, Pemda perlu menyusun roadmap pembangunan pariwisata Lampung dengan visi yang lebih kuat dan dapat bergabung di level nasional dan internasional.
    - b. Melakukan promosi objek wisata Lampung melalui media massa cetak dan elektronik skala nasional dan internasional, termasuk melalui internet dengan memberikan tagline khusus pada Lampung misalnya “ *Lampung: Legenda of Krakatoa*” dan sebagainya.
    - c. Memastikan seluruh objek wisata yang saat ini telah beroperasi dikelola dengan baik. Karenanya, perlu ada pembinaan terhadap pengelola objek wisata agar dapat mengelola objek wisatanya secara professional. Untuk objek wisata skala kecil, pemda perlu mendorong agar ada peranan perbankan dalam rangka membantu pembiayaan pembangunan.
    - d. Mendorong swasta berinvestasi di sektor pariwisata skala sedang dan besar melalui perijinan yang dipermudah, kepastian investasi, dan keamanan investasi dijamin pemerintah.
  6. Pemda Lampung harus meningkatkan frekuensi dan kualitas koordinasi dengan pemerintah Kabupaten / Kota untuk mengkoordinasikan setiap pembangunan yang akan dilakukan. Koordinasi ini bukan hanya dilakukan di level kepala daerah namun hingga ke level satuan kerja sehingga bukan hanya kebijakan kepala daerah yang perlu disinkronkan, namun juga hal teknis lainnya yang ada di level satker.
  7. Pemda Lampung agar mensosialisasikan kepada DPRD terhadap mega-mega proyek seperti JSS, Kota baru Natar dan Jalan tol, dll. Sehingga terbentuk sinergitas antara DPRD dan Pemda Lampung.
  8. Dalam rangka mempersiapkan kehadiran JSS, sektor yang harus dipersiapkan pemda Lampung agar tidak hanya menjadi penonton:
    - a. Persiapan untuk pengembangan sektor pariwisata unggulan khususnya saat JSS terlaksana, dengan paket nasional dan internasional
    - b. Penyiapan sadar wisata bagi seluruh eleven masyarakat, termasuk MUI agar *welcome* terhadap wisatawan
    - c. Pengembangan wisata-wisata kuliner yang diminati mancanegara

- e. Promosi melalui paket-paket wisata dan Internet
  - f. Optimalisasi harus investasi atau modal harus diupayakan sedini mungkin.
9. Beberapa kab/kota termasuk DOB di Provinsi Lampung mengalami déficit anggaran yang luar biasa sehingga pembangunan sedikit terganggu (al: Lamsel, Lamteng, Tuba, Lamtim, dll), kesejahteraan masyarakat menurun, maka perlu peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan di beberapa Kab/Kota termasuk di DOB oleh Provinsi.
  10. Sedangkan dari sisi perekonomian, lebih memprioritaskan pemberdayaan petani dan menjaga stabilitas harga.
  11. Dari sisi penduduk Provinsi Lampung perlu ditingkatkan dari dunia pendidikan dan kesehatan masyarakat, agar indeks dari pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Lampung dapat mencapai target normal.
  12. Kerusakan hutan di Lampung sudah cukup parah, yaitu hampir 60%. Agar Lampung terhindar dari bencana alam (banjir, kekeringan, kekurangan pasokan air, longsor dll) perlu dilakukan upaya yang serius penda terutama dinas Kehutanan agar perusakan hutan dan alih fungsi lahan diminimalisir.
  13. Agar seluruh perubahan anggaran yang akan dilakukan Kepala Daerah baik pemindahan lokasi kegiatan, perubahan jumlah anggaran, penundaan kegiatan, dll. Harus melalui konsultasi dan persetujuan DPRD, seperti biaya tak terduga pada APBD ± 42,92 M menjadi 91,557 M tanpa pemberitahuan atau persetujuan DPRD.
  14. Pemda harus sinergitas program dan pengolahan kegiatan yang berkelanjutan agar jelas apa-apa yang telah dilakukan dan sudah dicapai secara transparan termasuk semua dana-dana yang sudah dikeluarkan.

~~DEWAN~~ WAKILAN RAKYAT DAERAH  
~~PROVINSI~~ LAMPUNG  
Ketua,

~~FUMARWAN~~ CIK ASAN, MM.